

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Miswaty dan Tutik Yuliani

Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan

miswaty@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to examine the effect of the implementation of good governance and internal control organization to Balikpapan City Government performance and to see the relationship between the implementation of good governance with internal controls on government offices in the city Balikpapan and its influence on the performance of the organization, performance measurement models used in This study uses regression models. Research methods approach darn survey research respondents are civil servants who were randomly selected from all the Local Government Unit of Balikpapan. The data obtained will be analyzed using path analysis with measurement scale interval. Partial hypothesis testing using t test and simultaneously by using F test with a significance level ($\alpha = 0.05$). The results showed that the implementation of good governance, internal control and organizational performance has been carried out properly. The relationship between the implementation of good governance with the internal control has a positive relationship. The influence of the partial implementation of good governance significantly affect the performance of the organization. Effect of internal control is partially significant effect on the performance of the organization. Influence the implementation of good governance and internal control simultaneously significant effect on the performance of the organization

Kata kunci: *Good governance, Internal Control, Organization Performance*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan *good governance* di setiap unsur kegiatan pemerintah sudah merupakan tujuan dan tolak ukur kinerja pemerintah, sementara itu pelaksanaan sistem pengendalian intern organisasi mampu menggerakkan diterapkannya unsur-unsur *good governance*. Perubahan disektor publik terutama pada penyelenggaraan pemerintahan mulai memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini terlihat sejak dimulainya desentralisasi di pemerintah daerah.. Bila kita melihat ke belakang, kinerja aparat pelayanan publik di masa lalu lebih pada pelayanan publik yang kaku, diskriminatif, bertele-tele, biaya yang tinggi, pungutan ekstra dan cenderung birokratis. Pengukuran kinerja dianggap rutinitas saja, sehingga kinerja aparat pemerintah kurang maksimal. Akibatnya ouput yang dihasilkan kurang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dilapangan dan lebih parah lagi ouput penilaian tersebut tidak dapat dijadikan input dalam perencanaan dan pembenahan kinerja aparat pemerintah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwasanya pemerintah perlu melakukan perubahan dan pembenahan manajemen pemerintahannya. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud akan terwujud jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan paradigma baru manajemen pemerintahan, yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pengukuran kinerja cukup mendapat sorotan dalam reformasi sektor publik. Namun sejauh ini transparansi terhadap penilaian kinerja pemerintah dirasa kurang. Masyarakat tidak tahu bagaimana proses pengukuran kinerja dilakukan, karena keterlibatan masyarakat sangat kurang. Meskipun komitmen pemerintah mulai terlihat dengan pembenahan pelayanan publik untuk

mengembalikan kepercayaan publik. Pemerintah mulai beralih dari pengukuran tradisional ke pengukuran manajemen berbasis kinerja.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya dari luar saja. Namun dari diri pemerintah sendiri muncul motivasi untuk melakukan perubahan hal ini dapat dilihat dari munculnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 2010 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan yang terjadi diharapkan mampu mengantarkan pemerintah menuju terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik (Mardiasmo, 2005; 17). Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Dari beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* tersebut merupakan ukuran tuntutan publik terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pencapaian karakteristik *good governance* merupakan ukuran pencapaian kinerja pemerintah.

Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Robbin dalam Njanike K (2011) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai keseluruhan sistem control, keuangan dan sebaliknya, yang dibentuk oleh manajemen untuk melaksanakan bisnis perusahaan secara tertib dan efisien, memastikan kepatuhan terhadap manajemen, menjaga asset dan menjaga keamanan kelengkapan dan keakuratan catatan.

Penilaian kinerja organisasi memerlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relative lebih efektif diantara, alternative alokasi sumber daya yang berbeda, alternative desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.

Mengukur kinerja suatu organisasi tidak mungkin dapat dilakukan sebelum mengetahui terlebih dahulu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini karena menilai kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Pemerintah Daerah memiliki tujuan umum yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan serta mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya yang dimiliki oleh pemda tersebut, maka ukuran kinerja Pemerintah Daerah adalah seberapa besar organisasi pemerintah daerah tersebut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan serta mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya tersebut. Indikator lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut adalah seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan serta mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya itu dan seberapa besar efisiensi proses yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan serta mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya tersebut. Tujuan umum pemerintah daerah akan tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang harus terencana dan terprogram dengan keberadaan sistem tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem tata kelola pemerintahan yang baik ini

menuntut dibangunnya dan dijalankannya konsep dasar *good governance* dalam proses pengelolaan pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian tersebut diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Pelaksanaan *Good governance* berkorelasi terhadap Pengendalian Intern?
2. Apakah Pelaksanaan *Good governance* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi?
3. Apakah Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi ?
4. Apakah Pelaksanaan *Good governance* dan Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah Pelaksanaan *Good governance* berkorelasi terhadap Pengendalian Intern
2. Menguji apakah Pelaksanaan *Good governance* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi
3. Menguji apakah Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi
4. Menguji apakah Pelaksanaan *Good governance* dan Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good Governance

Pengertian *governance* dalam Mardiasmo (2005:17) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan public. Sementara itu Tjokromidjojo (2000) menyatakan bahwa *governance* artinya adalah memerintah, menguasai, mengurus. Dalam Craciun (2010) mendefinisikan bahwa *governance* dan *governing* atau pemerintahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memaknainya. *Good governing* merupakan hasil pengaruh dari adanya kinerja pemerintah yang terbangun dengan baik. *Good governance* didefinisikan oleh *World Bank* dalam Mardiasmo, (2005:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Penelitian Craciun (2010) *good governance* pada pemerintahan memberikan pengaruh atau kekuatan terutama dalam terjadi reformasi struktur di pemerintahan. Dengan melakukan studi perbandingan diantara beberapa Negara tentang penerapan *good governance* Craciun (2010) memperoleh bukti bahwa karakteristik *good governance* menurut *World Bank* masih sulit diukur untuk dilaksanakan, namun penerapan *good governance* menunjukkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah. Coyle:2003 menekankan pada perhatian dewan komisaris sebagai faktor yang ikut menentukan keberhasilan sebagai cara di mana usaha dari suatu organisasi diarahkan dan dikendalikan, bagaimana tujuan organisasi ditetapkan dan bagaimana kegiatan organisasi ditetapkan dan bagaimana kegiatan organisasi dan harapan para pemangku kepentingan diselaraskan.

Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh *Committee of sponsoring Organizations of Tradeway Commision (COSO)* bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Avram,2012 melihat pengendalian intern dan good governance saling berhubungan dimana ketika pengendalian tidak dilaksanakan dengan baik maka kesadaran tentang good governance pun menjadi kurang sehingga orang-orang yang ada di suatu organisasi tidak merasa punya tanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola yang baik atau good governance.

Kinerja Organisasi

Beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan nyata antara good governance dengan kinerja organisasi, seperti penelitian Tri dan Ferry (2012) mendapatkan bahwa kinerja keuangan dan good governance secara simultan mempengaruhi kinerja organisasi, dan menemukan bahwa good governance bukanlah variabel pemoderasi ke kinerja organisasi. Bocean , 2007 menguji pengaruh good governance terhadap kinerja organisasi. Temuan Bocean,2007 bahwa mekanisme good governance yang diterapkan sangat tergantung dari jenis organisasi dan tipe dari aktivitas produksi. Kerangka kerja good governance di sebuah Negara dapat mempengaruhi perkembangan pasar, perkembangan riset dan development, meningkatkan inovasi dan mempengaruhi perkembangan sector ekonomi kecil.

Pelaksanaan *good governance* yang efektif ditentukan pula dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang ada di organisasi tersebut sehingga pelaksanaan *good governance* dan penerapan pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja suatu organisasi (Budi Mulyawan, 2009). Pengendalian internal yang buruk mempengaruhi tata kelola atau governance suatu perusahaan menuju tata kelola yang buruk. Njanike, K, Mutengezanwa, M dan Gombarume, 2011 dalam makalah penelitiannya di Zimbabwe membuktikan bahwa sistem pengendalian intern yang dimiliki perusahaan sangat mempengaruhi penerapan tata kelola perusahaan di dalam suatu organisasi berperan penting. Demikian pula pada sector pemerintahan pengendalian internal yang baik telah mendukung terciptanya good governance. Bostan dan Grosu (2010) pelaksanaan good governance dan dukungan pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah, dengan transparansi informasi yang merupakan salah satu unsur good governance, merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk pencapaian efisiensi di pemerintahan sehingga punya daya saing pasar, mampu mencegah terjadinya penipuan akuntansi. Bota Avram, 2012, good governance dan pengendalian internal mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, untuk melindungi asset Negara, keterandalan laporan keuangan, kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kualitas pengendalian internal mendorong pelaksanaan good governance suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi demikian pula sebaliknya jika suatu organisasi memiliki pengendalian internal yang buruk akan akan mendorong penurunan kinerja organisasi. Kualitas pengendalian internal yang baik akan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai (Bota Avram, 2010)

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pelaksanaan *Good governance* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi

H2 : Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi

H3: Pelaksanaan *Good governance* dan Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Peneliti akan mengumpulkan data, menganalisis secara kritis data tersebut serta menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung, memberikan gambaran terhadap fenomena yang ada serta menerapkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari masalah yang dipecahkan.

Populasi Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi sasaran penelitian ini adalah obyek yang berhubungan dengan pelaksanaan Good Governance, pengendalian intern dan kinerja organisasi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Balikpapan. Teknik pengambilan sampel dengan metode proportional random sampling.

Kuesioner yang dikirim dan dikembalikan serta dapat diolah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Kuesioner dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	200 lembar
Kuesioner kembali	158 lembar
Kuesioner tidak direspon	44 lembar
Kuesioner bisa diolah	114 lembar
Tingkat Pengembalian	79 persen

Sumber : Data Primer diolah

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Ada dua jenis variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Kinerja Organisasi sebagai variabel terikat (dependent variabel) yang diberi notasi Y dan dua variabel bebas (independent variabel) yang diberi notasi X1 dan X2 yaitu Pelaksanaan Good Governance (X1) dan Pengawasan Intern (X2)

Prosedur Pengumpulan Data

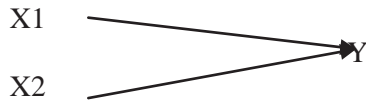
Responden penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Balikpapan baik dari kepala, Sekretaris, kepala bidang, kepala sub. Bidang serta pegawai pelaksana. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang dibuat secara terstruktur, didalamnya meliputi beberapa item pertanyaan yang disertai alternative jawaban.

Satuan pengukuran yang digunakan adalah scoring, yaitu pemberian nilai skor setiap alternative jawaban yang disediakan dalam pertanyaan dengan kategori jawaban yang bersifat tertutup terdiri atas 5 (lima) pilihan dengan menggunakan skala likert dengan skor 1 s/d 5. Skala likert adalah skala yang dirancang untuk menguji apakah responden sangat tidak setuju atau sangat setuju terhadap obyek psikologis yang dinilainya (Sugiana, 2008).

Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hipotesis dikemukakan, paradig penelitian ini didesain dalam model penelitian seperti berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Dimana: Y = Kinerja Organisasi, X1= Pelaksanaan Good Governance
X2= Pengendalian Intern

Uji Kualitas Data

Pengujian Validitas Alat Ukur

Pengujian validitas alat ukur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasi *Pearson's Product Moment*,). Untuk menentukan uji signifikansi korelasi product moment, secara statistic angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan t table dengan derajat bebas (db) = n-2 pada $\alpha = 0,05$ Hasil ouput SPSS pada lampiran menunjukkan bahwa nilai pearson correlation dan sig. (2 tailed) untuk semua variabel yang digunakan lebih kecil dari nilai pembanding berupa kritis $\alpha=0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua item yang diuji valid

a. Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

Uji reliabilitas untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk dengan melihat jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas menggunakan uji statistic dengan cronbach alpha(α). Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2005). Dengan bantuan program SPSS 15 dapat dilihat pada lampiran bahwa seluruh item yang digunakan dalam kuesioner menunjukkan nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 hal ini menunjukkan bahwa kuesioner ini dapat dipercaya (reliable) karena nilai alphanya lebih besar dari 0,6.

Tabel 2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.792	3

Good governance

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.653	6

Pengendalian interen**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	10

Teknik Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan SPSS versi 15 sebagai alat bantu pengolahan data.

Untuk menjawab hipotesis maka akan diteliti tingkat signifikansi variabel-variabel tersebut secara individual (uji statistik t), secara serempak (uji statistic F) dan koefisien determinasinya. Tingkat keyakinan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,05 dengan tingkat kesalahan yang ditolerir atau alpha sebesar 0.05 merujuk pada kelaziman yang digunakan dalam penelitian di bidang social.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan responden penelitian adalah pegawai Pemerintah Kota Balikpapan baik yang berada di Dinas-Dinas Pemerintah Kota Balikpapan maupun pegawai badan pemerintah kota Balikpapan. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan good governance (tata kelola yang baik) dan pengendalian internal organisasi terhadap kinerja organisasi pada pemerintah kota Balikpapan. Hasil penelitian mencakup antara lain statistik deskriptif untuk membahas jumlah sampel yang digunakan dan sumber data penelitian.

STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif memberikan gambaran data yang berasal dari pegawai pemerintah kota Balikpapan. Untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian baik independen dan dependen, digunakan tabel distribusi frekwensi yang menunjukkan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan deviasi standar. Analisis didasarkan pada jawaban 114 responden tentang variabel-variabel penelitian yang dirinci pada table berikut ini:

Tabel 3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
topoksi jelas standar etika	114	3	5	4.30	.514
mekanisme standarisasi informasi antar bagian mudah diakses	114	2	5	4.04	.643
informasi antar bagian mudah diakses	114	2	5	4.07	.704
sasaran organisasi karena perhatian pimpinan	114	2	5	3.75	.785
melakukan konsultasi dengan stakeholder	114	1	5	3.82	.694
perhatian dari pimpinan	114	1	5	3.81	.840
pimpinan selalu melakukan evaluasi	114	2	5	4.10	.595

prosedur untuk menghindari resiko	114	1	5	4.13	.631
pelaksanaan tugas diotorisasi pejabat	114	1	5	3.49	.971
pimpinan mereviu program kerja	114	2	5	4.04	.623
pimpinan membimbing moral karyawan	114	2	5	4.09	.711
staf selalu siap menyiapkan laporan	114	2	5	4.03	.697
laporan staf ke pimpinan informatife	114	2	5	3.93	.606
pemantau aktifitas oleh pimpinan	114	2	5	3.97	.684
komunikasi terbuka antar bagian	114	2	5	3.94	.720
Valid N (listwise)	114				

Berdasarkan data statistik deskriptif penelitian ini yaitu 114 responden, dengan melihat skala ordinal diperoleh rata-rata variabel kinerja organisasi di atas skala 4 atau derajat kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi pemerintah kota Balikpapan telah baik dan didukung oleh penerapan good governance dan pengendalian intern organisasi Pemerintah Kota Balikpapan.

Gambaran Umum Responden

Gambaran umum demografis responden untuk sampel di Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

Tabel 4
Gambaran Umum Responden

No.	Keterangan	Frekuensi
	Jenis Kelamin:	
	Laki-laki	53
	Wanita	61
	Jumlah	114
	Usia :	
	25 – 35 tahun	25
	35 – 45 tahun	56
	45 – 55 tahun	33
	Jumlah	114
	Tingkat Pendidikan	
	SLTA	33
	D3	5
	S1	67
	S2	9
	Jumlah	114
	Lama Bekerja	
	> 5 tahun	110
	≤ 5 tahun	4

Sumber data primer diolah

ANALISIS HASIL DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Dengan pengolahan data secara lengkap dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada lampiran. Secara lebih ringkas, hasil tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 5
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	.665	.380		1.752	.083
	Good Governance	.375	.103	.327	3.653	.000
	pengendalian interen	.438	.102	.385	4.304	.000

a Dependent Variable: kinerja organisasi

Berdasarkan table koefisien diatas terlihat bahwa konstanta bernilai 0,665 sedangkan koefisien garis regresi variabel Good Governance sebesar 0,375, pengendalian intern sebesar 0,438.

Formulasi regresi dari table koefisien diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Organisasi} = 0,665 + 0,375 \text{ Good Governance} + 0,438 \text{ Pengendalian Intern}$$

Nilai konstanta menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel Good Governance dan variabel Pengendalian Intern maka nilai Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah senilai 0,665. Sementara arah koefisien faktor Good Governance dan Pengendalian Intern sesuai dengan yang dihipotesiskan.

Berdasarkan table dibawah ini nilai R square mengidentifikasi besarnya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Semakin besar angka R square mendekati satu, maka akan semakin besar kemampuan variabel-variabel independen secara bersama-sama menjelaskan variabel dependen. Nilai R square 0,399 dalam penelitian ini mempunyai bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi adalah 39,9 % dan sisanya 63,2 % dipengaruhi oleh faktor lainnya selain kualitas audit. Angka Adjusted R square sebesar 0,388 dapat diartikan bahwa variasi kinerja organisasi Pemerintah Kota Balikpapan dapat dijelaskan oleh Good Governance dan Pengendalian Intern sebesar 38,8% melalui model. Sedangkan sisanya dari variabel lain.

Tabel 6

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	33Change Statistics					
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	F	R Square Change	F Change	df1	df2
1	.632(a)	.399	.388	.36842	.399		36.887	2	111	.000

a Predictors: (Constant), pengendalian interen, Good Governance

Uji F yang terlihat pada table Anova , digunakan untuk melihat signifikansi kontribusi variabel Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi Pemkot Balikpapan. Dari hasil F test didapat nilai F hitung pada hasil pengolahan data sebesar 36,887. Perhitungan ini juga menghasilkan tingkat signifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,005. Berdasarkan hal tersebut diatas model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan. Hasil ini juga mengandung pengertian bahwa variabel-variabel Good governance dan Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja organisasi Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 7
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.014	2	5.007	36.887	.000(a)
	Residual	15.066	111	.136		
	Total	25.080	113			

a Predictors: (Constant), pengendalian interen, Good Governance

b Dependent Variable: kinerja organisasi

Uji t yang terlihat pada table coefficients , digunakan untuk melihat pengaruh variabel Good Governance dan Pengendalian Intern secara parsial mempengaruhi Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 8
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.665	.380		1.752	.083
	Good Governance	.375	.103	.327	3.653	.000
	pengendalian interen	.438	.102	.385	4.304	.000

a Dependent Variable: kinerja organisasi

Pada pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh penerapan Good Governance, hasil pengolahan data menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,653 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka variabel Good Governance berpengaruh secara signifikan dalam menunjang kinerja Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja organisasi Pemerintah Balikpapan telah baik dan salah satunya disebabkan karena diterapkannya prinsip-prinsip good governance di pemerintah Kota Balikpapan dan hasil penelitian ini juga bisa disimpulkan bahwa karyawan pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Pada pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi, hasil pengolahan data menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,438 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka variabel Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan dalam menunjang kinerja Organisasi

Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja organisasi Pemerintah Balikpapan telah baik dan salah satunya disebabkan karena diterapkannya prinsip-prinsip Pengendalian Intern di pemerintah Kota Balikpapan. Dengan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian Intern yang baik dan karyawan pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan prinsip-prinsip Pengendalian Intern.

Terdapat kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan dengan topik yang sama bahwa pemerintah kota di Indonesia pada umumnya memiliki kinerja yang baik dan dipengaruhi oleh penerapan Good Governance dan Pengendalian Intern. Demikian pula pada penelitian Bocean (2007) dimana mekanisme Good governance sangat tergantung dari jenis organisasi dan akan mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

5. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman hubungan antara Penerapan Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi. Ketiga hipotesis yang diajukan untuk menguji hubungan antara Penerapan Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi terbukti.
2. Hipotesis pertama yang berbunyi bahwa Pelaksanaan Good Governance secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi terdukung secara signifikan. Ini berarti terdapat hubungan antara Pelaksanaan Good Governance dan Kinerja Organisasi.
3. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi secara signifikan terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan penerapan pengendalian intern di lingkungan Pemkot Balikpapan sangat penting.
4. Demikian pula dengan hipotesis ketiga bahwa Pelaksanaan Good Governance dan Penerapan Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan.

SARAN

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada perkembangan pengetahuan. Dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Memperluas lingkup sampel penelitian, baik jenis perusahaan maupun wilayah sehingga pemahaman dan generalisasi terhadap hubungan antara Pelaksanaan Good Governance dan Penerapan Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilakukan secara komprehensif. Namun perlu diperhatikan pengaruh nilai-nilai budaya masyarakat setempat, hal ini penting karena nilai-nilai budaya masyarakat untuk masing-masing daerah itu tidak sama.
2. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel lain yang lebih baik sebagai pengaruh faktor kinerja organisasi.
3. Responden penelitian ini hanya pegawai pemerintah Kota Balikpapan. Untuk meningkatkan kehandalan hasil penelitian ini ada baiknya jika ada penelitian lain yang melibatkan responden pemerintah daerah yang lain di Indonesia. Selain itu jika bisa dengan jumlah sampel yang lebih besar akan semakin memberikan akurasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Mamun, Qaiser Rafique Yasserm Ashikur Rahman, 2013, A Discussion of Sitability of Only One Vs More than One Theory For Depicting Corporate Governance, Modern Economy, Vol 4, pp. 37-48
- Abdul Halim, 2002, Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik- Pemerintah Daerah, Yogyakarta, Penerbit UPP YKPN.
- Bambang Suprasto, 2006, "Pengaruh Interaksi Antara Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Penekanan Anggaran terhadap Slack". AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
- Cristina Bota Avram, 2012, Investigation of external audit's good practices in the context of corporate governance-evidence from Romania, journal of Knowledge Management, economics and information technology, issue 8
- Claudia George Bocean, 2007, Corporate Governance and Firm Performance, Journal Management and marketing, ISSN/EISSN 18412416, issue 1 pages 125-131, publisher Universitaria Press Craiova
- Desmond Uelese Amosa, 2010, Local Government and Good Governance: The Case of Samoa, Commonwealth Journal of Local Governance, Issue 7.
- Elisabeth Reginato, 2011, Formal or Substantial Innovation: Enquiring the Internal Control System Reform in the Italian Local Government, International Journal of Business and Management, Vol. 6 No. 6.
- Lowensohn, S., & Reck, J. (2004) 'Longitudinal Analysis of Local Government Audit Quality.' Research in Governmental and Non Profit Accounting , 11: 213-228
- Luminita Maria Craciun 2010, Governance Or Governing-the missing link, Journal Acta Universita Danubius:Oeconomica ISSN/EISSN: 20650175, publisher Danubius University volume 6
- Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi.
- Reny Febriana, 2007, Hubungan Antara Adopsi dan Implementasi Dengan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Pada Unit Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik,, Published by Public Sector Accountant Corpartment
- Stephen Ocheni, 2012, The Effectiveness of Anti Corruption Agencies in Enhancing Good Governance and Sustainable Development Growth in Africa: The Nigeria Paradox Under Obasanjo Administration 2003-2007, Journal Canadian Social Science, Vol. 8 No. 13 pp 16-21